

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2021

Resa Novita^{1*}, Fefri Indra Arza²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: resanovita1711@gmail.com

Tanggal Masuk:

02 November 2023

Tanggal Revisi:

05 Maret 2024

Tanggal Diterima:

11 Maret 2024

Keywords: *Balancing Fund; Capital Expenditure; Local Government Financial Performance; Local Original Revenue.*

How to cite (APA 6th style)

Novita, R., & Arza, F. I. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2021. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6 (1), 430-443.

Abstract

This study aims to analyze the effect of local original income, balancing funds, and capital expenditure on the financial performance of district/city governments on the island of Sumatra in 2021. This study used a quantitative approach. The samples taken in this study were based on predetermined criteria. The results of the sample selection of 106 regional governments which are Regency / City regional governments on the island of Sumatra in 2021. Multiple regression analysis to test the hypothesis was carried out using SPSS 29 which showed the results of the study that local original revenue had a significant positive effect on local government financial performance, while balancing funds and capital expenditure had a significant negative effect on local government financial performance.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1367>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan pilar utama pelaksanaan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah dikarenakan pemerintah pusat tidak dapat mengelola pertumbuhan daerah secara keseluruhan (Anazodo et al., 2016). Kedua undang-undang tersebut merupakan kerangka kerja yang solid dalam memberlakukan otonomi daerah sehingga dapat menggali potensi masing-masing daerah agar memiliki peluang dalam meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerahnya dalam mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dengan terus melakukan usaha untuk mencari dan meningkatkan sumber keuangan yang ada

di daerahnya. Menurut Halim (2007), kinerja keuangan dapat diukur melalui rasio keuangan yang dihitung berdasarkan data keuangan daerah, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menerapkan rasio keuangan pada anggaran daerah mungkin menjadi salah satu cara untuk menentukan seberapa baik pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerah mereka secara finansial. Halim (2012) menyatakan penggunaan rasio untuk mengukur kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu praktik pengelolaan keuangan daerah yang terbuka, jujur, demokratis, efektif, dan bertanggung jawab. Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk membiayai dirinya sendiri, kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dapat dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman Halim, 2007). Hal ini berarti semakin tinggi nilai rasio ini, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan daerah (Mahmudi, 2013).

Saat ini, kinerja pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun pusat, masih belum memuaskan. Meskipun implementasi otonomi daerah telah dimulai sejak 1 Januari 2001, namun hingga kini hanya sedikit pemerintah daerah yang mengalami peningkatan yang signifikan dalam kemandirian keuangan. Berdasarkan hasil revidi Badan Pemeriksa Keuangan RI atas kemandirian fiskal daerah tahun 2020, 443 dari 503 pemda atau 88,7% masuk dalam kategori belum mandiri. Hanya terdapat 10 dari 503 pemda atau 2% yang masuk dalam kategori mandiri, di mana 7 dari 10 pemda atau 70% berada di Pulau Jawa. Mayoritas pemerintahan daerah yaitu 468 dari 503 pemda atau 93,4% tidak mengalami perubahan status atau kemandirian fiskalnya selama pandemi COVID-19. Hal ini juga dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh Sayadi (2020), yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang terletak di Pulau Jawa lebih baik dibandingkan kinerja keuangan yang terletak di Pulau Sumatera.

Dalam melaksanakan pemerintahan daerah, pemerintah wajib melaporkan tanggung jawab keuangan daerahnya sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya, baik di tingkat daerah maupun kabupaten/kota. Hasil yang diberikan BPK dalam IHPS Semester 1 (2022) secara terperinci BPK mengungkapkan adanya 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan sebesar Rp18,37 triliun. Terdapat 538 (3,4%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp1,04 triliun. Dari 538 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan tersebut terdapat sebesar Rp1,04 triliun, berupa 53 (9,9%) permasalahan ketidakhematan sebesar Rp787,90 miliar, 7 (1,3%) permasalahan ketidakefisienan, dan 478 (88,8%) sebesar Rp257,90 miliar permasalahan ketidakefektifan. Apabila suatu daerah terdapat banyak permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifitas maka dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan yang ada pada daerah tersebut dianggap belum baik (Verawaty et al., 2020).

Adapun berdasarkan informasi yang di dapatkan dari IHPS tahun 2021, kerugian negara terbesar terjadi pada pemerintah daerah sebesar Rp 3.09 triliun. Adapun permasalahan yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan pemerintahan daerah pada tahun 2021 pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera yaitu adanya ketidaksesuaian / melebihi ketentuan belanja barang dan jasa pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 6,21 miliar, adanya kelebihan pembayaran pekerjaan pada Pemerintah Aceh namun atas pekerjaan yang dimaksud belum melakukan pelunasan pembayaran sebesar Rp 5,1 miliar. Selanjutnya adanya kekurangan penerimaan yang terjadi pada pemerintah provinsi Riau karena adanya denda keterlambatan pekerjaan yang belum dipungut/diterima sebesar Rp 7,77 miliar dan penerimaan selain denda keterlambatan yang belum dipungut/diterima oleh Pemerintah Kota Padang Panjang sebesar 1,70 miliar (bpk.go.id)

Indikator kinerja keuangan juga dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja daerah yang diukur dari sisi pendapatan dan pengeluaran daerah (Lucky, 2013). Pemerintah daerah dapat dikatakan mandiri apabila mampu memaksimalkan potensi daerahnya melalui penyerapan PAD. Menurut Abdullah (2015) semakin meningkat kontribusi PAD terhadap struktur APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Pada penelitian yang dilakukan Budianto (2016) mengungkapkan bahwa PAD memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik secara simultan maupun parsial, sehingga peningkatan PAD dapat mendukung kinerja tersebut. Namun pada penelitian yang dilakukan Andirfa (2016) di pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh menunjukkan tidak ada hubungan yang jelas antara Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan daerah secara parsial.

Selain PAD, kegiatan pemerintahan juga dibiayai oleh dana perimbangan. Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004 dana perimbangan bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Budianto et al, (2016) ; Lubis et al., (2022) menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang artinya semakin banyak dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat menunjukkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerahnya

Dalam mengembangkan ekonominya, suatu daerah juga dipengaruhi oleh berbagai variabel, termasuk infrastruktur yang memadai. Dana alokasi pembangunan infrastruktur dianggarkan dalam kelompok belanja modal dalam kerangka APBD. Ayinde dkk. (2015) menyatakan bahwa belanja modal pemerintah adalah alokasi dana yang digunakan oleh pemerintah untuk proyek-proyek spesifik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan warga negara dalam jangka waktu yang panjang, umumnya lebih dari satu tahun.

Menurut Permendagri Nomor 27 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Kementerian Dalam Negeri, masalah lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah bahwa persentase anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal masih jauh di bawah 30%. Sebuah laporan dari Bisnis.com (2019) juga menunjukkan bahwa pada tahun 2018, belanja pegawai terus menjadi kategori pengeluaran yang dominan dalam anggaran daerah, mencapai 35,6% dari total pengeluaran pemerintah daerah, sementara belanja modal hanya menggunakan 19,4% dari total anggaran. Namun, pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera kenyataannya biaya operasional jauh lebih sering digunakan dari pada belanja modal untuk pembangunan daerah. Faktor permasalahan tersebut bisa jadi disebabkan minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap penggalan potensi-potensi pendapatan asli daerah. Selain itu, pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Pulau Sumatera memang cenderung lebih rendah dibandingkan dana perimbangan dari pemerintah pusat

Penelitian yang dilakukan oleh Andirfa et al., (2016), menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fernandes (2022) yang menyatakan belanja modal tidak berdampak pada kinerja pemerintah daerah karena belanja modal yang dilakukan Kabupaten/Kota kurang memperhatikan kesejahteraan umum dan akibatnya masyarakat kurang merasakan dampaknya

Berdasarkan temuan-temuan tersebut membuktikan bahwa masih jelas terlihat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Pulau Sumatera masih dapat dikatakan belum baik. Penelitian ini penting untuk diteliti karena dapat memperoleh hasil yang menyatakan faktor apa saja yang memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Penelitian ini juga didasari adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yang menyatakan hasil yang berbeda terhadap pengaruh dari masing-masing variabel.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya, memiliki perbedaan pada objek penelitian, penelitian ini menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah yang ada di Pulau Sumatera, dikarenakan pada fenomena mengenai kinerja keuangan dipaparkan di atas terlihat masih rendahnya tingkat kemandirian di beberapa pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera sehingga diduga adanya pengaruh variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera juga merupakan pulau yang memiliki pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang paling banyak daripada pulau lainnya yang ada di Indonesia yaitu 154 Kabupaten/Kota. Pembaharuan tahun juga dilakukan peneliti supaya dapat menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang terbaru.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut teori agensi, pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) memiliki hubungan dimana *principal* mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan atas nama *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Teori agensi mempertimbangkan dua pihak yang memiliki akses informasi yang berbeda. *Prinsipal*, yang merupakan satu pihak, memberikan wewenang kepada agen, pihak lain (Dewata et al., 2021). Teori agensi berpendapat bahwa pemerintah daerah harus memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai agen, tetapi masyarakat mungkin ragu bahwa pemerintah daerah benar-benar bertindak untuk kepentingan terbaik mereka. Dengan berkurangnya asimetri informasi melalui umpan balik masyarakat, diharapkan akuntabilitas antara wilayah dan pemerintah daerah akan seimbang.

Pada penelitian ini, pemerintah pusat dan masyarakat bertindak sebagai *prinsipal* yang memiliki kepercayaan penuh pada pemerintah daerah yang bertindak sebagai agen mereka untuk melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam rangka menumbuhkan kemandirian keuangan daerah, masyarakat berhak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Teori keagenan memiliki hubungan dengan variabel belanja modal, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan, dimana perolehan dana yang diperoleh daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan pemerintah serta harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut Halim (2004), Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat berperan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan otonomi daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kinerja keuangan pemerintah daerah menggambarkan hasil pekerjaan di bidang keuangan daerah, termasuk penerimaan dan pengeluaran daerah selama siklus anggaran. Dengan memanfaatkan informasi keuangan dari laporan keuangan yang telah dihasilkan oleh pemerintah daerah, evaluasi kinerja keuangan daerah memerlukan penentuan sejauh mana tujuan, visi, dan sasaran daerah telah tercapai (I. P. Sari et al., 2016). Oleh karena itu, diharapkan semua pemerintah dapat memberikan hasil keuangan yang kuat. Diperlukan pengukuran kinerja, sesuai dengan Wibowo (2014) untuk menilai apakah telah terjadi penyimpangan dari rencana sepanjang pelaksanaan kinerja, telah sesuai dengan jadwal yang ditentukan, atau sudah memenuhi harapan.

Pendapatan Asli daerah (PAD)

Menurut Halim (2014), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Dana Perimbangan

Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004 dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Menurut Budianto dan Alexander (2016), Dana Perimbangan merupakan sumber pendanaan daerah yang dialokasikan oleh APBN untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya dan mencapai tujuan otonomi daerah, khususnya dalam hal perbaikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk membangun otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, peningkatan pendapatan daerah sangat penting. Pemerintah daerah dapat mendongkrak pendapatan dengan meningkatkan jumlah dana perimbangan yang diterimanya.

Belanja Modal

Belanja Modal didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pernyataan Nomor 02 paragraf 37 sebagai pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lain yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Distribusi barang dan jasa dapat dilakukan agar berjalan lebih efektif dan efisien melalui infrastruktur yang dibiayai oleh belanja modal. Namun pada APBD, seringkali tujuan melampaui yang telah ditentukan sementara realisasi belanja modal sering gagal dari target yang dianggarkan pada akhir tahun fiskal. Hali ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan pengeluaran staf daripada mencapai target belanja modal pada akhir tahun fiskal (Halim, 2014).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan asli daerah mencerminkan potensi yang ada di suatu daerah. Pendapatan asli daerah bersifat khusus dan tidak akan memiliki nilai yang sama di setiap daerah, karena bergantung pada kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Pendapatan asli daerah merujuk pada penerimaan yang dikumpulkan dari daerah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk retribusi daerah, pajak daerah, dan sumber pendapatan sah lainnya. Teori agensi digunakan untuk menjelaskan hubungan antara masyarakat sebagai pemberi sumber pendanaan dan pemerintah daerah sebagai agen yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan yang diberikan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah daerah yang berhasil mengelola keuangan akan mencerminkan peningkatan kinerja keuangan dalam pembiayaan usaha dan pembangunan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan biaya dari pemerintah pusat. Masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap tata kelola keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Budianto dan Alexander (2016); Lathifa et al, (2019) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana Perimbangan merupakan implementasi dari prinsip perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai salah satu sumber pendapatan, dana perimbangan memegang peran yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Kenyataannya, tidak semua daerah memiliki potensi pendapatan asli daerah yang sama untuk dimaksimalkan. Oleh karena itu, dana perimbangan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi daerah. Prastiwi & Aji (2020) berpendapat bahwa dana perimbangan memiliki peran penting dalam menentukan kesuksesan pemerintahan daerah dengan mempengaruhi kinerja keuangan mereka. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat maka akan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah semakin menurun.

Penelitian ini sejalan dengan Budianto et al, (2016); Lubis et al., (2022); Andjarwati et al., (2021) menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang artinya semakin banyak dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat menunjukkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengeluaran dalam bentuk belanja daerah. Salah satu jenis belanja daerah yang penting adalah belanja modal, yang memiliki sifat produktif dan dapat memberikan manfaat dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Penggunaan yang efektif dari belanja modal akan menciptakan peluang yang lebih besar untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Keterkaitan dengan teori keagenan yaitu pemerintah daerah sebagai agen harus bertanggung jawab atas pengelolaan aset-aset tersebut dan harus mengelola penggunaan belanja modal yang dianggarkan dengan risiko dana yang diperoleh. Penelitian ini mengemukakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Maulina et al., (2021) berpendapat bahwa pengelolaan yang tepat akan mengarah pada peningkatan layanan publik dan hasil kinerja keuangan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al, (2019) yang menyatakan belanja modal pada pemerintah daerah juga memiliki dampak positif pada kinerja keuangan

H3: Belanja Modal Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera pada tahun 2021, yang terdiri dari 154 Kabupaten / Kota dengan rincian 120 Kabupaten dan 34 Kota. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus sampling. Namun, setelah dilakukannya seleksi data, maka diketahui terdapat data outlier sehingga sampel yang digunakan sebanyak 106 pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun anggaran 2021 yang bersumber dari publikasi LHP LKPD tahun 2021 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.

Definisi dan Pengukuran Variabel

Sugiyono (2017) menegaskan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini variabel terikat (variabel dependen) adalah kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini berfokus pada kinerja keuangan karena terdapatnya penurunan kinerja keuangan pada kabupaten/kota di pulau Sumatera. Pada penelitian ini peneliti menggunakan rumus pengukuran rasio kemandirian.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah} \times 100\%}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Pinjaman}}$$

Pada penelitian ini variabel independen diantaranya adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pada variabel pendapatan asli daerah diukur dengan merujuk pada sumber-sumber pendapatan yang terdapat di wilayah tersebut dan dikumpulkan berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2008). Adapun pengukuran variabel ini menggunakan indikator :

PAD = pajak daerah + retribusi daerah + hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain-lain pendapatan daerah yang sah

2. Dana Perimbangan

Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004 dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Tujuan dana perimbangan adalah untuk membangun keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Indikator variabel ini diukur dengan :

Dana Perimbangan = DAU + DAK + DBH

3. Belanja Modal

Pengeluaran anggaran yang dilakukan untuk membeli aktiva tetap dan aktiva lain yang memberikan keuntungan lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam belanja modal (Halim, 2007). Indikator variabel ini diukur dengan :

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jala, Irigasi, dan jaringan + Belanja Asset Tetap Lainnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	106	16955302775	178917308913	83495398673,12	38367140049,305
Dana Perimbangan	106	415571082139	1346876304292	748677947263,87	205908552562,443
Belanja Modal	106	44390581071	313035735431	161159235629,27	54502937280,286
Kinerja Keuangan	106	2,34	13,72	7,6585	2,58780
Valid N (listwise)	106				

Dari Tabel 1 diketahui jumlah data yang berhasil diolah sebanyak 106 data. Untuk variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah daerah nilai standar deviasi 2,58780 dan rata-rata 7,6585. Nilai minimum dari variabel ini yaitu 2,34 dan nilai maksimum sebesar 13,72. Variabel independen diantaranya, pendapatan asli daerah hasil statistik deskriptif diperoleh standar deviasi 38.367.140.04,305 dengan rata-rata Rp 83.495.398.673,12, nilai minimum sebesar Rp 16.955.302.775, nilai tertinggi Rp 178.917.308.913. Dana perimbangan dengan standar deviasi sebesar 205.908.552.562,443 dengan rata-rata 748.677.947.263,87. Nilai terkecil Rp 415.571.082.139 dan nilai terbesar Rp 1.346.876.304.292. Belanja Modal dengan standar deviasi 54.502.937.280,286, rata-rata 161.159.235.629,27, nilai minimum Rp 313.035.735.431 dan nilai maksimum Rp 313.035.735.431.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 2
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			106
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		,98028422
Most Extreme Differences	Absolute		,067
	Positive		,050
	Negative		-,067
Test Statistic			,067
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			,200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		,286
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,274
		Upper Bound	,298
		Bound	

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 1535910591.

Sumber : Output SPSS, 2023

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa hasil uji normalitas menunjukkan nilai *Asymp. Sig.* lebih besar dari 0,05 yakni 0,200, berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Pendapatan Asli Daerah	,498	2,007
	Dana Perimbangan	,458	2,185
	Belanja Modal	,660	1,514

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : Output SPSS 29,2023

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui nilai VIF X_1 (2,007), X_2 (2,185) dan X_3 (1,514) lebih kecil dari pada 10,00 serta nilai *tolerance* X_1 (0,498), X_2 (0,458) dan X_3 (0,66) lebih besar dari 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

	Model	t	Sig.
1	(Constant)	3,748	<,001
	Pendapatan Asli Daerah	1,494	,138
	Dana Perimbangan	-1,599	,113
	Belanja Modal	,222	,825

a. Dependent Variable: ABS RES

Sumber : Output SPSS 29,2023

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel X_1 (0,138). X_2 (0,113) dan variabel X_3 (0,825) lebih besar dari 0,05. Maka hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heterokedastisitas

Uji Model

Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,925 ^a	,857	,852	,99460

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan

a. Dependent Variable : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : Output SPSS 29, 2023

Nilai Adjusted R Square pada Tabel 5 sebesar 0,852, dapat disimpulkan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal sebagai variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,852 atau 85,2%. Untuk sisanya yaitu 14,8% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Uji Regresi Simultan (Uji F)

Tabel 6
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	602,252	3	200,751	202,938	,000 ^b
	Residual	100,901	102	,989		
	Total	703,152	105			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
b. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan

Sumber : Output SPSS 29, 2023

Berdasarkan hasil analisis uji F pada Tabel 6, maka nilai F dari output SPSS sebesar 202.938 dengan nilai sig. 0,000. Dari uji $F < 0,05$ disimpulkan yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal sebagai variabel dependen secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 7
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,687	,388		22,412	,000
	Pendapatan Asli Daerah	8,820E-11	,000	1,308	24,606	,000
	Dana Perimbangan	-9,269E-12	,000	-,738	-13,303	,000
	Belanja Modal	-9,016E-12	,000	-,190	-4,114	,000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : Output SPSS 29, 2023

Tabel 7 dapat dilihat untuk pendapatan asli daerah nilai sig. 0,000, t_{hitung} 24,606 dan t_{tabel} 1,983. Nilai sig. 0,000 < probabilitas 0,05, nilai t_{hitung} 24,606 > t_{tabel} 1,983, artinya pendapatan asli daerah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada variabel dana perimbangan memiliki nilai sig. 0,000, nilai koefisien β bernilai negatif yaitu - 9,26E12 dan nilai t_{hitung} sebesar -13,303 dengan t_{tabel} sebesar 1,983. Nilai sig. 0,000 < probabilitas 0,05, t_{hitung} -13,303 > t_{tabel} 1,983, artinya dana perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk variabel belanja modal memiliki nilai sig. 0,000 dengan nilai koefisien β dari belanja modal bernilai negatif yaitu - 9,016E12 dan nilai t_{hitung} sebesar -2,588 dengan t_{tabel} sebesar 1,98827. Nilai sig. 0,000 < probabilitas 0,05 dan juga nilai t_{hitung} -4,114 > t_{tabel} 1,983, yang berarti adanya pengaruh secara parsial antara belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah..

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel 4 diperoleh hasil pengujian statistik dengan nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,005$) dengan nilai koefisien 8,820. Ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Budianto dan Alexander (2016) dan Lathifa et al. (2019) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa besar ataupun kecilnya pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Pulau Sumatera.

Penelitian ini menggunakan teori keagenan untuk menguji hubungan antara pemerintah daerah yang bertindak sebagai agen dan masyarakat sebagai sumber pembiayaan untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah daerah yang berhasil mengelola keuangan akan mencerminkan peningkatan kinerja keuangan dalam pembiayaan usaha dan pembangunan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan biaya dari pemerintah pusat. Masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap tata kelola keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Teori Agensi dalam penelitian ini antara masyarakat sebagai pemberi sumber pendanaan dan pemerintah daerah sebagai agen yang bertanggungjawab dalam mengelola keuangan yang diberikan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah daerah yang berhasil mengelola keuangan akan mencerminkan peningkatan kinerja keuangan dalam pembiayaan usaha dan pembangunan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan biaya dari pemerintah pusat. Masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap tata kelola keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel 4 diperoleh hasil pengujian statistik dengan nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,005$) dengan nilai koefisien -9,269. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera terkena dampak negatif yang signifikan dari dana perimbangan secara parsial. Prinsip otonomi daerah akan menjadi tantangan yang harus dicapai jika pemerintah daerah bergantung pada dana perimbangan. Artinya, semakin besar dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, semakin besar kemungkinan pemerintah daerah tersebut memiliki tingkat kemampuan finansial dan kemandirian yang rendah karena tingginya tingkat ketergantungan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Budianto et al. (2016); Lubis et al. (2022) Andjarwati et al., (2021) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Semakin tinggi dana tranfer yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka semakin bergantung kabupaten/kota yang di Pulau Sumatera sehingga kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera menjadi menurun.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel 4 diperoleh hasil pengujian statistik dengan nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05 ($0,001 < 0,005$) dengan nilai koefisien -9,016. Ini menunjukkan bahwa dana perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota pada Pulau Sumatera. Ini menunjukkan bahwa kegiatan belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten/Kota pada Pulau Sumatera tahun 2021 belum mampu sepenuhnya memberikan kontribusi terhadap kemandirian kinerja keuangan.

Keterkaitan dengan teori keagenan yaitu pemerintah daerah sebagai agen harus bertanggung jawab atas pengelolaan aset-aset tersebut dan harus mengelola penggunaan belanja modal yang dianggarkan dengan risiko dana yang diperoleh. Belanja modal dapat dianggap sebagai kegiatan investasi pemerintah daerah, namun kegiatan belanja modal pada pemerintah daerah tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Pengeluaran investasi dapat meningkatkan aset tetap yang dimiliki daerah dan menciptakan pembiayaan jangka panjang.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Maulina et al (2021) dan Sari et al (2019) yang menyatakan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Hal ini sejalan dengan penelitian Malau & Parapat (2020) dan Oktavia Handayani (2021) yang membuktikan bahwa variabel belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, artinya kenaikan belanja modal menyebabkan penurunan kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan penganggaran belanja modal tidak selamanya diimbangi dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Akibatnya belanja modal yang telah dianggarkan sangat bergantung pada dana bantuan dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah dinilai belum bisa mandiri secara finansial.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka temuan penelitian dapat diringkas sebagai berikut : Pada pengujian F pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal sebagai variabel dependen secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera pada tahun 2021. Hal itu membuktikan bahwa semakin besar atau kecilnya pendapatan asli daerah maka akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun 2021. Dana perimbangan dan belanja modal mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Sumatera pada tahun 2021 yang berarti setiap peningkatan dana perimbangan maupun belanja modal akan menyebabkan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut: Hasil penelitian ini tidak dapat memberikan gambaran yang jelas dan luas mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah karena adanya data yang di outlier cukup banyak. Penelitian ini bersifat cross section artinya hanya diteliti dalam satu waktu yang terbatas dan hanya untuk menunjukkan kondisi yang ada pada saat penelitian dilakukan.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut: Pemerintah daerah diharapkan harus dapat menggali potensi daerahnya misalnya dengan meningkatkan pendapatan pajak daerah dan meminimalkan penggunaan dana perimbangan untuk membangun kemandirian daerah otonom. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambah variable tambahan yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan daerah dan memperpanjang perbedaan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anazodo, O. R., Igbokwe-Ibeto, J. C., & Nkomah, B. B. (2016). Local government financial autonomy: a comparative analysis of Nigeria and Brazil. *Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter)*, 5(10), 38.
- Andirfa, M., Dr. Hasan Basri, M. C., & Dr.M.Shabri.A.Majid, S. E. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, 5(2302–0164), 30–38.
- Andjarwati, T., Budiarti, E., Soemadijo, P. S., & Yasin, M. (2021). Analysis Of Local Own Revenue And Balancing Funds On The Financial Performance Of Districts And Cities In The Region Of East Java Province. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 13(1), 235–250. <https://doi.org/10.34109/ijefs.202112233>
- Ayinde, K., Kuranga, J., & Lukman, A. F. (2015). Modeling Nigerian Government Expenditure, Revenue and Economic Growth: Co-Integration, Error Correction Mechanism and Combined Estimators Analysis Approach. *Asian Economic and Financial Review*, 5(6), 858–867. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr/2015.5.6/102.6.858.867>
- Budianto, & Stanly W Alexander. (2016). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA, Vol.4 No.4(2302–1174)*, 844–851.
- Dewata, E., Sari, Y., & Nouvanti, F. (2021). The Effect of Locally Generated Revenue as an Intervening Variable on the Financial Performance of the Regional Government of South Sumatra Province. *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*, 7(4), 80–98. <https://doi.org/10.32602/jafas.2021.034>
- Fernandes, J., & Putri, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 198–209.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi Revisi). Salemba Empat.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. *Salemba Empat*.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Muhammad Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Lathifa, H., & Haryanto. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(2). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Lubis, I. T., & Ningsi, E. H. (2022). Determinants Of Financial Performance In Local Governments In District/City In Indonesia. *Journal of Management*, 12(2), 2385–2390.
- Lucky, D. (2013). Analysis Of The Effect Of Regional Financial Performance To Economic Growth and Poverty Through Capital Expenditure (Case study of 38 Regencies/Cities in East Java Province). In *Journal of Economics and Sustainable Development* www.iiste.org ISSN (Vol. 4, Issue 19). Online. www.iiste.org
- Mahmudi. (2013). *Akuntansi Sektor Publik* (Mahmudi, Ed.). UII Press.

- Malau, E. I., & Parapat, E. P. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK Dan BI)*, 3(2), 332–337.
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.373>
- Oktavia, C., & Handayani, N. (2021). Pengaruh PAD, Tax Effort, Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(3).
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018). *Jurnal Kajian Bisnis*, 28(1), 89–105.
- Sari, I. P., Agusti, R., & Rofika. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/kotaPulau Sumatra). *JOM Fekon*, 3(1).
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>
- Sayadi, M. H. (2020). Analisis perbandingan kinerja keuangan provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 16(2), 96–104.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Verawaty, V., Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah, N. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Mbia*, 19(1), 21–37.
- Wibowo. (2014). *Manajemen Kinerja (Keempat)*. Rajawali Pers.